LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.

2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

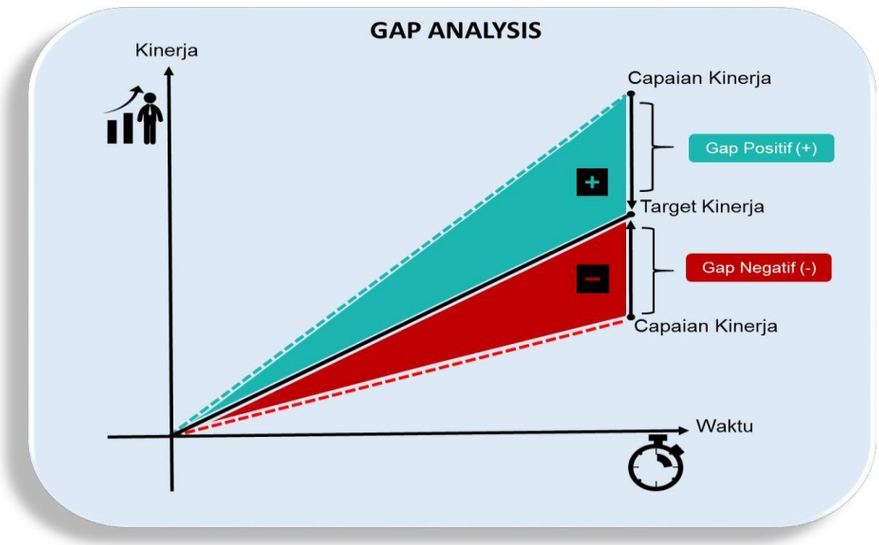
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja

berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



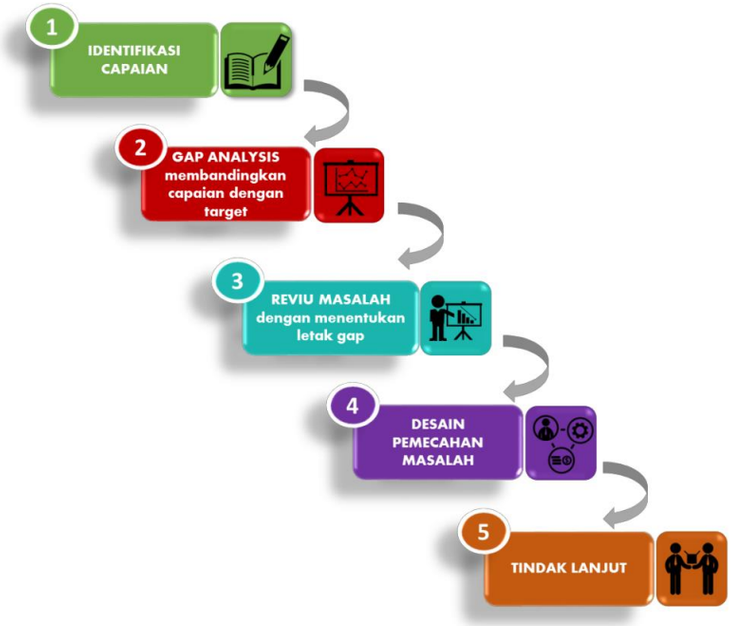
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagainya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit BPK	WTP	75 %	75 %
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketetapan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	99%	25%	25%
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	80%	25	25

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama yaitu Opini atas audi BPK telah tercapai sebesar 75 % atau Kriteria Sedang dikarenakan tahapan pemeriksaan BPK masih dalam proses pemenuhan dokumen yang diminta pemeriksa dan pengujian dokumen.
2. Capaian indikator kinerja kunci yaitu
    - Persentase Ketetapan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah tercapai sebesar 25 % atau Kriteria Rendah dikarenakan tahapan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah masih dalam proses rekonsiliasi atas jurnal pencatatan SKPD.
    - Presentase Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah tercapai sebesar 25% atau Kriteria Sangat Rendah dikarenakan tahapan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah masih dalam proses rekonsiliasi atas jurnal pencatatan SKPD.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
1	**Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**		**Keuangan**				**265.888.005.965,17**	**35.51 %**		**94.422.839.792**
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP BPKAD**	**82**		**7.798.155.811,35**	**75**		**1.558.689.983**
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**67.336.100**	**32**	**%**	**14.252.000**
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	16.154.000	1	dokumen	3.534.000
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	3.948.300	0	dokumen	0
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	5.197.000	0	dokumen	0

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	4.620.700	1	dokumen	2.780.000
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	4.770.000	0	dokumen	0
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	laporan	13.795.700	1	laporan	0
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	laporan	18.850.400	3	laporan	7.938.000
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**100**	**%**	**6.236.701.683,45**	**75%**	**%**	**1.325.723.822**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	orang/ bulan	6.200.624.583,45	43	orang/ bulan	1.307.877.822
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi danpenyusunan laporankeuangan akhir tahunSKPD	Jumlah laporankeuangan akhir tahunSKPD dan laporanhasil koordinasipenyusunan laporankeuangan akhir tahunSKPD	1	laporan	18.092.500	1	laporan	17.846.000
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17	laporan	17.984.600	4	laporan	0
		5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**100**	**%**	**6.600.000**	**10%**	**%**	**1.200.000**
		5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	6.600.000	0	laporan	1.200.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**146.573.300**	**10**	**%**	**18.611.362**
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	paket	0	0	paket	0
		5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150	orang	38.098.300	0	orang	10.121.362
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	orang	108.475.000	0	orang	8.490.000
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	**100**	**%**	**242.124.528**	**10**	**%**	**16.430.780**
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	4.720.654	0	paket	0

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	paket	4.740.150	0	paket	87.000
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1	paket	101.215.074	0,1	paket	2.577.680
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	8.182.800	0	paket	59.000
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	dokumen	3.000.000	1	dokumen	750.000
		5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	10	laporan	3.176.050	0	laporan	0
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	Jumlah laporanPenyelenggaraanrapat koordinasi dankonsultasi SKPD	36	laporan	110.386.000	3	laporan	12.957.100
		5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	200	dokumen	6.703.800	50	dokumen	0

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		-
		5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan**	**100**	**%**	**82.745.999,90**	**10**	**%**	**21.645.000**
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10	unit	82.745.999,90	1	unit	21.645.000
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	0	unit	0	0	unit	0
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**695.082.500**	**30%**	**%**	**138.121.799**
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	3	laporan	2.050.000	0	laporan	11.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	240.000.000	3	laporan	46.402.179
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	453.032.500	3	laporan	91.708.620
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara**	**100**	**%**	**320.991.700**	**24%**	**%**	**22.705.220**
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	18	unit	137.933.500	6	unit	16.739.220
		5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10	unit	4.996.200	0	unit	0
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10	unit	83.590.000	3	unit	3.494.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	94.472.000	0	unit	2.472.000
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)**	**100**	**%**	**257.191.252.153,82**	**25**	**%**	**64.943.410.675**
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	**30**	**%**		**41**	**%**	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	**40**	**%**		**28.44**	**%**	
				Persentase Penurunan SILPA	**5**	**%**		**0.02**	**%**	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**80**	**%**		**16.53**	**%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.01	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH**	**Presentase Dokumen Anggaran Daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu**	**100**	**%**	**1.028.466.953**	**10**	**%**	**156.395.580**
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	dokumen	227.441.050	0	dokumen	4.700.000
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi danPenyusunan PerubahanKUA dan PerubahanPPAS	Jumlah dokumenperubahan KUA danperubahan PPAS yangdisusun	2	dokumen	233.705.950	0	dokumen	4.135.000
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	272.673.900	0	dokumen	38.120.100
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	5	dokumen	294.646.053	1	dokumen	109.440.480
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah		0	orang	0	-	orang	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
			Pemerintah Kabupaten/Kota							
		5.02.02.2.02	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah**	**100**	**%**	**283.480.850**	**16,03**	**%**	**50.009.495**
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	9000	dokumen	187.340.200	1241	dokumen	24.628.045
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	208	dokumen	36.005.950	100	dokumen	12.291.000
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi fasilitasi asitensi, sinkronisasi, supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.	92	dokumen	12.199.200	92	dokumen	7.092.950

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	dokumen	12.806.000	1	dokumen	225.000
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	650	dokumen	8.781.500	159	dokumen	550.000
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	dokumen	26.348.000	3	dokumen	5.222.500

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.03	**KOORDINASI DANPELAKSANAANA KUNTANSI DANPELAPORAN KEUANGANDAERAH**	**Presentase DokumenPertanggungja wabanPelaksanaan APBDYang Disusun**	**100**	**%**	**326.670.700**	**10%**	**%**	**65.754.675**
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	11	laporan	13.313.000	0	laporan	0
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4	laporan	31.570.000	0	laporan	0
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	dokumen	266.757.700	0	dokumen	65.754.675

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHPH BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			0	-		-
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	dokumen	6.025.000	0	dokumen	0
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150	orang	9.005.000	0	orang	0
		5.02.02.2.04	**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**80**	**%**	**255.532.428.650,82**	**25%**	**%**	**92.534.250.225**
		5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6	laporan	217.513.169.849	2	laporan	92.360.750.225
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4	laporan	10.423.615.401,82	1	laporan	173.500.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota	2	laporan	27.595.643.400	0	laporan	0
		5.02.02.2.05	**Pengelolaan data danimplementasi SistemInformasi PemerintahDaerah lingkupkeuangan daerah**	**Persentase OPD yangmendapatkanpembinaanimplementasi SIPD**	**100**	**%**	**20.205.000**	**10%**	**%**	**9.335.500**
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	100	orang	**20.205.000**	**3**	**orang**	**9.335.500**
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yang sesuai ketentuan**	**100**	**%**	**898.598.000**	**25%**	**%**	**48.404.334**
				Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap	**5**	**%**		**0.07**	**%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.03.2.01	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**5**	**%**	**898.598.000**	**0.07**	**%**	**48.404.334**
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	52	dokumen	117.001.000	10	dokumen	0
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	52	dokumen	35.000.000	10	dokumen	0
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	laporan	240.000.000	10	laporan	29.314.115
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1	dokumen	150.000.000	0	dokumen	2.066.000
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	52	laporan	40.001.000	10	laporan	0
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	laporan	200.000.000	1	laporan	9.707.975

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2026)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	30	laporan	90.000.000	0	laporan	3.601.000
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	26	dokumen	26.596.000	3	dokumen	3.715.244

Analisis capaian kinerja Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dan Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	**Analisis Capaian Kinerja**
1	**2**
Keuangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Pada capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk seluruh kegiatan rutin dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Masih rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II.**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Realisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dengan capaian Sedabng karena dokumen telah tersusun sesuai dengan jadwal**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Realisasi Evaluasi kinerja perangkat daerah sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Realisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dengan capaian Sedang karena dokumen telah tersusun sesuai dengan jadwal tetapi belum maksimal**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan dan hitungan yang sesuai kondisi sebenarnya
Koordinasi danpenyusunan laporan keuangan akhir tahunSKPD	Koordinasi danpenyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sudah terlaksana dengan realisasi sesuai dengan target
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Kriteria masih rendah pada Penilaian Capaian Kinerja**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sudah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Kriteria** masih rendah
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi sudah terlaksana tetapi belum maksimal
Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan sudah terlaksana tetapi belum maksimal
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja masih rendah** hal **ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II**
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor belum terlaksana
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah tangga sudah terlaksana tetapi belum maksimal
Penyediaan bahan logistik	Penyediaan bahan logistic sudah terlaksana sesuai dengan jadwal
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sudah terlaksana tetapi belum maksimal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sudah terlaksana tetapi belum maksimal
Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu belum terlaksana
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tamu sudah terlaksana tetapi belum maksimal

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD belum terlaksana
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja masih rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II**
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya sudah terlaksana dan melebihi target karena terjadi perub
Pengadaan mebel	Sub kegiatan pengadaan mebel sudah terlaksana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Sedang hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II**
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat belum terlaksana
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sudah telaksana. Dan yang terlaksana hanya pembayaran listrik. Untuk air dan jasa komunikasi dihapuskan tetapi belum maksimal
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sudah terlaksana dan belum maksimal
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II**
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sudah terlaksana 18 unit dan 1 unit mobil dilelang
Pemeliharaan mebel	Sub kegiatan Pemeliharaan mebe belum terlaksana
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya sudah terlaksana
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Pada capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja masih rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
	rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	**Realisasi Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja masih rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II**
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS sudah proses pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Bidang Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sudah proses pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan Bidang Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen hasil dari sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sudah proses pelaksanaan kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	**Realisasi Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Sedang rendah** hal **ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II**
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah hasil Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sudah teralisasi sesuai dengan target
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sudah terealisasi
Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sudah terealisasi
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sudah terealisasi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sudah terealisasi
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan sudah terlaksana
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	**Realisasi Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Rendah** rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II
Rekonsiliasi danVerifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO danBeban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi danVerifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban sudah proses pelaksanaan
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan untuk Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sudah sudah proses pelaksanaan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Hasil rancangan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota proses pelaksanaan
Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah sudah proses pelaksanaan
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sudah terlaksana proses pelaksanaan
PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Realisasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Sedang**
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Untuk sub kegiatan Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan dengan hasil output jumlah laporan sudah terlaksana dan terealisasi
Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Untuk sub kegiatan Pengelolaan dana darurat dan mendesak sudah terlaksana dan sudah terealisasi
Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Sub kegiatab Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota sudah proses pelaksanaan kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah	**Realisasi Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II**
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota sudah proses pelaksanaan kegiatan
PROGRAM PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH	**Realisasi Program PengelolaanBarang Milik Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Sanagt Tinggi**
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Realisasi Kegiatan PengelolaanBarang Milik Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja tinggi**
Penyusunan Standar Harga	Untuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Harga sudah terlaksana sesuai dengan jadwal perencanaan dan sesuai hasil koordinasi dengan 52 OPD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sudah terlaksana dan sesuai hasil koordinasi dengan 52 OPD
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah belum terlaksana
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah sudah terlaksana
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah sudah terlaksana
Pengamanan Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sudah terlaksana
Penilaian Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah sudah terlaksana
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sudah terlaksana

Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

1. Capaian Output Kegiatan pada Program Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah Tribulan I rata-rata 33 %, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah **Masih rendah** hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II
2. Capaian Output Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tribulan I rata-rata 20 %, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja

Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah **Masih rendah** hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II

3. Capaian output Sub Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tribulan IV rata-rata 20 %, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah adalah **Masih rendah** hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sinergitas seluruh stakeholder	Belum optimalnya komitmen OPD dalam penyusunann dokumen, penganggaran , penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Sinergitas seluruh stakeholder	Belum tertibnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
3.	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	Sinergitas seluruh stakeholder	Belum tertibnya pelaporan barang investaris

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
1	**2**	**3**
Keuangan		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Faktor pendorong kegiatan ini adalah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan agar tepat waktu dan pelaksanakaan kegiantan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Administrasi Keuangan Perangkat daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Faktor pendorongnya adalah lancer dan tepat waktu dalam pembuatan SPJ Gaji	Penetapan Anggaran Kas Tidak Tepat

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Koordinasi danpenyusunan laporan keuangan akhir tahunSKPD	Faktor pendorongnya adalah koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD tepat waktu	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Faktor pendorongnya sub kegiatan ini disusun dengan tepat waktu dan dipenuhi dengan data dukung yang berkualitas	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dari Bidang-bidang
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Faktor pendorongnya sub kegiatan ini disusun dengan tepat waktu dan dipenuhi dengan data dukung yang berkualitas	Identifikasi BMD terhadap jumlah barang mengalami keterlambatan/kesulitan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah terlaksananya sesuai dengan target perencanaan	Pemahaman pengelola keuangan terkait dengan Peraturan/ketentuan pengelolaan keuangan daerah belum maksimal
Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah terlaksananya sesuai dengan target perencanaan	Pemahaman pengelola keuangan terkait dengan Peraturan/ketentuan pengelolaan keuangan daerah belum maksimal
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Faktor pendorong dari sub kegitaan ini adalah adanya kerusakan pada komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sehingga memerlukan pembaharuan	Jumlah ATK yang tersedia terbatas
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan OPD	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli terbatas
Penyediaan bahan logistik	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik sesuai dengan kebutuhan OPD	Jumlah ATK yang tersedia terbatas
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan OPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia terbatas

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan OPD	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi
Fasilitasi kunjungan tamu	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah telaksananya kunjungan tamu berjalan lancar	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah telaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasu SKPD berjalan lancar	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah berjalan dengan baik	Pencarian Arsip Produk BPKAD kurang optimal
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Faktor pendorong kegiatan ini banyaknya penyedia jasa dan adanya peralatan dan mesin lainnya yang sudah rusak dan segera ditindaklanjuti	Dokumen RKBMD belum dipedomani dalam penyusunan RKA
Pengadaan mebel	Faktor pendorong kegiatan ini banyaknya penyedia jasa dan adanya pengadaan mebel yang sudah rusak dan segera ditindaklanjuti	Dokumen RKBMD belum dipedomani dalam penyusunan RKA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Faktor pendorong kegiatan yaitu tersedianya surat-menyurat	Arsip Surat belum tertata secara optimal
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Faktor pendorong dari sub kegitaan ini adalah proses tagihan dan pembuatan SPJ tagihan listrik lancar	Tidak tersedianya internet, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Faktor pendorong dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan bahan dan alat kebersihan tidak optimal
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Faktor pendorong sub kegitan ini adalah pajak dan operasional kendaraan dinas berjalan dengan lancar	Kualitas pemakaian kendaraan dinas operasional menurun/rusak
Pemeliharaan mebel	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah mebel terpelihara dengan baik	Kualitas mebel menurun/rusak
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah peralatan	Kualitas Peralatan dan mesin menurun/rusak

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
	dan mesin lainnya terpelihara dengan baik	
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya terpelihara dengan baik	Kondisi bangunan gedung rmenurun/rusak
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH		
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Adanya amanat regulasi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2026; Sinergitas seluruh stakeholder	Waktu penyusunan terbatas bersamaan dengan penugasan yang lain dan data pendukung kurang memadai.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sinergitas seluruh stakeholder	Waktu penyusunan terbatas bersamaan dengan penugasan yang lain dan data pendukung kurang memadai; Kendala sistem seperti sub kegiatan yang muncul dobel pada SIPD sehingga mempengaruhi angka keseluruhan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Adanya amanat regulasi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2026; Sinergitas seluruh stakeholder	Waktu penyusunan terbatas bersamaan dengan penugasan yang lain dan data pendukung kurang memadai; Kendala sistem seperti sub kegiatan yang muncul dobel pada SIPD sehingga mempengaruhi angka keseluruhan.
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Mendapat Dana Transfer dari Pusat sehingga perlu dilakukan proses perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; Sinergitas seluruh stakeholder	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan berjalan sehingga fokus dan waktu terbagi.
KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penerbitan dokumen SP2D sesuai dengan pengajuan SKPD, Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi	OPD belum melengkapi permohononan sesuai ketentuan sehingga pelayanan SP2D dan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
	diselesaikan tepat waktu, Laporan dan rekonsiliasi Dagulir telah diselesaikan secara bertahap.	lainnya tidak dapat segera ditindaklanjuti
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Verifikasi anggaran kas SKPD dan Penerbitan SPD sesuai dengan jadwal	OPD belum melengkapi permohononan sesuai ketentuan sehingga pelayanan SP2D dan lainnya tidak dapat segera ditindaklanjuti
Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dan rekonsiliasi dana transfer sesuai dengan ketentuan dan peraturan	-
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	PKS dengan Bank Jatim terkait SP2D Online masih proses, KKPD masih proses (untuk SKPD yang ada pergantian PA)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi sudah sesuai dan dilaksanakan sesuai jadwal	Data rekon yang disampaikan oleh SKPD ada yang kurang lengkap dan beberapa belum tepat waktu
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan	Penerapan petunjuk teknis (Peraturan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Keputusan dan Surat Edaran) yang kurang dipahami oleh seluruh SKPD
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		
Rekonsiliasi danVerifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO danBeban	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan data keuangan yang telah direkonsiliasi antara SKPD dan PPKD	Kurangnya komitmen sebagian perangkat daerah memperlambat penyelesaian selisih saat proses rekonsiliasi, Dokumen pendukung sering tidak lengkap atau terlambat disampaikan, Permasalahan pada sistem/aplikasi keuangan yang menghambat proses rekonsiliasi
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur kewajiban penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang	Batas waktu penyusunan LKPD yang terbatas, Penyusunan laporan masih sangat bergantung pada pendampingan bidang Akuntansi dan Pelaporan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjabaran melalui Peraturan Kepala Daerah.	BPKAD, sehingga memperlambat proses konsolidasi, - Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM akuntansi, khususnya pada perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Menurunya perolehan Opini BPK dan keterlambatan penetapan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	-
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan sosialisasi yang memadai diperlukan karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan	Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap SAP, Kebijakan Akuntansi dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan, Tingginya Mutasi/Rotasi pejabat pengelola keuangan menyebabkan pembinaan tidak berkelanjutan
PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Penyaluran bantuan kepada desa	Penyaluran Bantuan Bantuan Keuangan Tidak Tepat Waktu
Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan dana darurat didorong oleh kondisi **tidak terduga, mendesak, dan berdampak luas**, yang membutuhkan respon cepat pemerintah demi menjaga keselamatan, pelayanan publik, dan stabilitas daerah	Penyaluran Bantuan Sosial dan BTT Dalam Rangka Penanganan Bencana Tidak Tepat Waktu
Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran dana bagi hasil	Penyaluran BHPRD Tidak Tepat Waktu
Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah		
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan sosialisasi yang memadai	Terhambatnya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
PROGRAM PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH		
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Penyusunan Standar Harga	Tingkat inflasi yang terkendali pada periode penyusunan, sehingga selisih antara harga survei dengan harga pada saat pelaksanaan anggaran tidak terlalu jauh.	Sering terjadi keterlambatan pengusulan RKBMD dari SKPD sehingga data yang diusulkan dengan RKA yang disusun tidak sama..
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dukungan dari Sekretaris Daerah dalam menegakkan disiplin penyampaian usulan RKBMD tepat waktu oleh seluruh SKPD.	Sering terjadi keterlambatan pengusulan RKBMD dari SKPD sehingga data yang diusulkan dengan RKA yang disusun tidak sama.
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan barang milik daerah dianggap belum tertib karena masih terdapat Kesalahan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset	Kompetensi Pengurus Barang Perangkat Daerah yang masih kurang memadai (Pengurus Barang tidak memahami Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terkait batas minimal **kapitalisasi).**
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penggunaan label aset berbasis digital mempercepat proses rekonsiliasi data antara kondisi fisik di lapangan dengan catatan di sistem aplikasi.	Banyaknya aset lama yang fisiknya sudah tidak ada namun masih tercatat di KIB -
Pengamanan Barang Milik Daerah	Adanya kerja sama yang kuat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sertifikasi tanah atau aset Pemda.	Banyak aset tanah atau bangunan yang tidak memiliki dokumen secara lengkap
Penilaian Barang Milik Daerah	Adanya kerjasama yang baik dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan penilaian aset yang memerlukan keahlian khusus.	belum adanya ASN yang memiliki sertifikasi fungsional Penilai Pemerintah, sehingga harus mengandalkan pihak eksternal seperti KPKNL dan KJPP.
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Adanya kebijakan/ regulasi yang spesifik mengatur prosedur penghapusan dan pemindahtanganan BMD	Adanya kebijakan/ regulasi yang spesifik mengatur prosedur penghapusan dan pemindahtanganan BMD

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Tribulan I tahun 2026 Masih Rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II dan selanjutnya dapat ditingkatkan untuk hasil yang lebih optimal. Untuk faktor yang mendorong sedangkan faktor yang menghambat akan menjadi bahan evaluasi sehingga dapat direduksi pada tribulan berikutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun berikutnya maka langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap Subkegiatan dan melakukan sinergi dengan SKPD Kabupaten Nganjuk agar pelaksanaan dapat optimal , efisien dan efektif dengan memanfaatkan Aplikasi SIM-DTH dan Aplikasi SIMPEL;
2. Melakukan sinergi dengan Dinas Terkait terhadap Barang Milik Daerah sebagai efisiensi biaya dengan memanfaatkan Aplikasi SIM-ASET;
3. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan instransi terkait dalam hal penangganan SIPD yang sering gangguan;
4. Membuat analisis resiko terhadap setiap subkegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan Aplikasi PERISAI.

Nganjuk, 08 April 2026
Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk



Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001